

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MELALUI PROGRAM KAWASAN RUMAH PANGAN LESTARI (KRPL) SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN POTENSI SUMBER PANGAN

Anita Pratiwi¹, Novita Tresiana², Ita Prihantika³

^{1:2:3}Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung
anitapратиwi601@yahoo.com

Abstrak

Kerawanan pangan merupakan permasalahan yang telah membebankan masyarakat karena harus mendapatkan kebutuhan pangan dengan harga yang tinggi. Untuk mengatasi kerawanan pangan setiap negara perlu melakukan pembangunan ketahanan pangan untuk menjamin ketersediaan potensi pangan yang cukup, bergizi, dan seimbang. Pemenuhan pangan tersebut dapat dilakukan dengan pemanfaatan potensi lahan yang ada melalui program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL). Penelitian ini berupaya untuk mengetahui keberhasilan pemberdayaan Kelompok Wanita Tani melalui program kawasan Rumah Pangan Lestari dan mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan program kawasan Rumah Pangan Lestari.

Kata Kunci: Pemberdayaan perempuan, Kawasan Rumah Pangan Lestari, Kelompok Wanita Tani

Abstract

Food shortages is an issue that has imposed the community because it has to get food needs at a high price. To overcome the food shortages, every country needs to do the development potential food security to ensure the availability of sufficient, nutritious, and balanced food potential. The fulfillment of food can be done by utilizing the potential of existing land through the Sustainable Food House Area Program (KRPL). This study attempted to know groups of women farmers' empowerment success through the Sustainable Food House Area Program and to know the supporting factors and inhibitory factors in the implementation of the Sustainable Food House Area Program.

Keywords: Women's Empowerment, Sustainable Food House Area, Women Farmers Group.

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara agraris yang memiliki potensi kekayaan alam yang berlimpah dan beranekaragam baik berupa rempah-rempah maupun berupa hasil pangan seperti umbi-umbian, jagung, dan beras. Sebagian besar penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani seperti bercocok tanam dan beternak untuk menghasilkan hasil pangan yang cukup untuk keberlangsungan hidupnya. Dalam hal ini pangan menjadi kebutuhan dasar manusia dan memiliki peranan penting bagi kehidupan suatu bangsa. Ketersediaan pangan yang lebih kecil dibandingkan

kebutuhannya dapat menciptakan ketidakstabilan ekonomi. Saat ini Indonesia yang tergolong sebagai negara agraris belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan pangan akan masyarakatnya, impor pangan yang dilakukan Indonesia masih tinggi hal ini menjadi permasalahan yang telah membebankan masyarakat karena masyarakat harus mendapatkan kebutuhan pangan dengan harga yang tinggi (Tribun, 2018). Banyaknya kasus kelaparan, gizi buruk, dan jumlah impor yang sangat besar juga mengisyaratkan bahwa Indonesia belum dalam kondisi "tahan pangan". Kenaikan harga pangan bagi keluarga yang tidak

bekerja dan tidak memiliki penghasilan dapat mengancam kebutuhan gizi keluarga. Berdasarkan hasil Pemantauan Status Gizi (PSG) yang dilakukan Kementerian Kesehatan pada tahun 2016, status gizi pada indeks BB/U pada balita 0-59 bulan di Indonesia menunjukkan persentase gizi buruk sebesar 3,4%, gizi kurang sebesar 14,4% dan gizi lebih sebesar 1,5%. Kemudian hasil pengukuran status gizi PSG 2016 dengan indeks BB/U pada balita 0-23 bulan di Indonesia menunjukkan persentase gizi buruk sebesar 3,1%, gizi kurang sebesar 11,8% dan gizi lebih sebesar 1,5% persentase ini terlihat masih tinggi. Salah satu faktor penyebab yang mengakibatkan gizi buruk yaitu minimnya ketersediaan pangan pada skala rumah tangga. Melihat dari tingginya data gizi buruk di atas, maka setiap negara perlu melakukan pembangunan ketahanan pangan untuk menjamin ketersediaan potensi pangan yang cukup baik pada tingkat rumah tangga, daerah, maupun nasional. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk membangun ketahanan pangan adalah dengan mengeluarkan kebijakan. Karena setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah menjadi dasar tindakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah yaitu program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL).

Program KRPL merupakan program pemberdayaan yang dalam pengimplementasiannya melibatkan Kelompok Wanita Tani. Kegiatan ini merupakan perwujudan dari Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal, yang ditindaklanjuti oleh Peraturan Kementerian Pertanian Nomor 43 Tahun 2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Kementerian Pertanian, 2010). Program KRPL bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, peran, dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pola konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang. Selain itu tujuan dari program KRPL yaitu untuk membangun kemandirian pangan, meningkatkan penganekaragaman pangan, meningkatkan

kualitas gizi keluarga, meningkatkan perekonomian masyarakat, dan menumbuhkembangkan ekonomi kreatif masyarakat desa.

Kota Bandar Lampung merupakan salah satu pelaksana program KRPL, hal ini karena kota Bandar Lampung memiliki luas lahan yang cukup luas. Pelaksanaan program KRPL tersebut menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah Kota Bandar Lampung untuk meningkatkan kemandirian pangan dengan memberdayakan masyarakatnya terutama kelompok wanita tani yang menjadi target group dari program ini. Dengan melibatkan partisipasi Kelompok Wanita Tani diharapkan mampu menunjang perekonomian dari anggota KWT dalam upaya membantu suami meningkatkan pendapatan keluarganya.

Terdapat 6 Kelompok Wanita Tani yang menerima program KRPL, yaitu terdapat di Desa Batu Putu, Desa Gunung Terang, Desa Way Dadi Baru, Desa Sukarame Baru, Desa Pengajaran, dan Desa Srengsem. Namun dalam hal ini pelaksana program KRPL yang aktif yaitu di Desa Way Dadi Baru dan Desa Pengajaran. Adanya program KRPL sangat membantu perekonomian mereka, bukan hanya dapat mengurangi pengeluaran rumah tangga tetapi mereka mendapatkan penghasilan dari kegiatan KRPL yang dilakukan. Berdasarkan hasil wawancara pada saat pra riset, dalam pelaksanaannya kegiatan KRPL melalui Kelompok Wanita Tani tersebut masih menemui berbagai permasalahan yang membuat kegiatan Kelompok Wanita Tani belum berjalan secara optimal diantaranya yaitu (1) Kurangnya komitmen dari pendamping kelompok dalam melaksanakan proses pendampingan di lapangan, hal ini dikarenakan banyaknya tugas yang harus diselesaikan oleh penyuluh pendamping terkait sehingga tidak terfokus pada pendampingan Kelompok Wanita Tani tersebut, (2) Keaktifan anggota Kelompok Wanita yang mulai menurun, masih banyak anggota kelompok dari setiap pelaksana program KRPL yang cenderung pasif. Anggota kelompok KRPL ini cenderung aktif pada saat tahun pertama berjalannya program saja, setelah itu keaktifannya berkurang dan motivasinya menurun sehingga dikhawatirkan dapat mengancam

keberlanjutan pelaksanaan program Kawasan Rumah Pangan Lestari.

Dengan demikian, alasan peneliti dalam mengangkat tema tersebut sebagai obyek penelitian karena peneliti ingin melihat bagaimana keberhasilan pemberdayaan Kelompok Wanita Tani melalui program KRPL dan peneliti ingin mengetahui apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan program KRPL di Kota Bandar Lampung.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Anthin Lathifa, Briliyan Emawati, dan Heny Yuningrum (2016)	Pemberdayaan Ekonomi Pekerjaan Rumah Tangga Melalui Pelatihan Kerajinan Payet di Kelurahan Sumurbroto Kecamatan Banyumanik.	Strategi pemberdayaan perempuan pekerja rumah tangga dilakukan melalui beberapa tahap yaitu pemberian kognitif melalui kesadaran, pemberian dan membangun motivasi, paradig keterlibatan perempuan dalam pembangunan dapat meningkatkan akses ekonomi perempuan, dan meningkatkan pendapatan keluarga.
2	Nurul Hidayat (2012)	Pemberdayaan Usaha Kecil Berbasis Produk Pertanian Studi Kasus Kelompok Wanita Tani Krido Winoto Dusun Kadipolo Sendangtirto Berbah Sleman.	Dampak yang dihasilkan para pelaku usaha adalah diperolehnya pendapatan keuntungan, dan peningkatan perekonomian. Dampak tersebut juga dirasakan oleh lingkungan sekitar tempat tinggal, dimana pelaku usaha dapat menciptakan peluang kerja baru, dan para anggota Kelompok Wanita Tani saat ini menjadi

			penyedia bahan baku produksi dan aktif dalam kegiatan pemasaran di daerahnya.
	Arini Mayanfa'uni (2017)	Pemberdayaan Perempuan Melalui Kelompok Wanita Tani Cempaka di RW 02 Kelurahan Petukangan Selatan.	Dengan adanya kegiatan pemberdayaan di Kelompok Wanita Tani Cempaka, membuat perempuan yang ada di RW 02 memiliki akses dan kesempatan dalam menambah ilmu pengetahuan dan keterampilan. KWT Cempaka ini juga memberikan berbagai kesempatan kepada anggotanya untuk mendapatkan pengetahuan serta pelatihan yang diadakan dari berbagai pihak.

Sumber: Diolah Oleh Peneliti (2020)

Berdasarkan perbandingan ketiga penelitian terdahulu maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan penelitian Adapun perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian penulis lebih menekankan pada hasil dari pelaksanaan pemberdayaan Kelompok Wanita Tani yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kota Bandar Lampung, sedangkan penelitian terdahulu lebih menekankan pada sikap, minat, dan melihat dampak dari kegiatan pemberdayaan di masyarakat.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Kebijakan Publik

Konsep kebijakan publik dirumuskan dan dimaknai secara beragam, hal ini disebabkan oleh kerangka berfikir yang dipergunakan beberapa ahli berbeda-beda tergantung dari sudut mana mengartikannya. Beberapa

pendapat pengertian kebijakan publik menurut para ahli yaitu :

1) Parker dalam (Tresiana, 2017:7) mendefinisikan kebijakan publik sebagai suatu tujuan tertentu, atau serangkaian asas tertentu, atau tindakan yang dilaksanakan oleh pemerintah pada suatu waktu tertentu dalam kaitannya dengan suatu subyek atau sebagai respon terhadap suatu keadaan yang kritis.

2) Thomas R. Dye (Tresiana, 2017:7) kebijakan publik adalah pilihan apapun yang dilakukan oleh pemerintah, baik untuk melakukan sesuatu ataupun untuk tidak melakukan sesuatu.

3) Carl Friedrich mendefinisikan kebijakan publik sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan dan merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu.

Adapun implikasi kebijakan publik menurut James E. Anderson dalam (Tresiana, 2017:6) adalah sebagai berikut :

1) Kebijakan publik dirumuskan oleh instansi atau pejabat pemerintah dengan tindakan yang mengarah pada tujuan tertentu.

2) Kebijakan publik berisi tindakan yang saling terkait dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah.

3) Kebijakan publik berkaitan dengan apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah dalam bidang tertentu.

4) Kebijakan publik yang diambil bisa bersifat positif dalam arti merupakan tindakan pemerintah mengenai segala sesuatu masalah tertentu, atau bersifat negatif dalam arti keputusan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu.

Menurut Hogwood dan Lewis A. Gunn dalam (Tresiana, 2017:7) kebijakan publik dipandang sebagai program. Kebijakan sebagai program mencakup serangkaian kegiatan yang menyangkut pengesahan, pengorganisasian dan pengerahan atau penyediaan sumber daya yang

diperlukan. Berdasarkan pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang dibuat oleh instansi atau pejabat pemerintah yang berorientasi pada suatu tujuan tertentu guna memecahkan permasalahan publik.

Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan merupakan konsep utama dalam pembangunan masyarakat. Konsep utama yang terkandung dalam pemberdayaan adalah bagaimana memberikan kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk memajukan kehidupannya di masyarakat. Secara konseptual pemberdayaan merupakan upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi tidak mampu untuk melepaskan diri dari keterbelakangan. Menurut Mardikanto dan Soebiato (2019:28) pemberdayaan masyarakat merupakan upaya memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh individu, kelompok, dan masyarakat luas agar mereka memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan dan mengontrol lingkungannya agar dapat memenuhi keinginan-keinginannya. Pemberdayaan masyarakat menyangkut dua kelompok yang saling terkait, yaitu masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan.

Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya (Faedlulloh, Irawan, & Prasetyanti: 2019). Menanamkan nilai-nilai budaya modern, seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, dan kebertanggungjawaban adalah bagian pokok dari upaya pemberdayaan. Menurut World Bank dalam Mardikanto dan Soebiato (2019:28) pemberdayaan adalah upaya untuk memberikan kesempatan dan kemampuan kepada kelompok masyarakat (miskin) untuk mampu dan berani bersuara atau menyuarakan pendapat, ide, dan gagasannya serta kemampuan dan keberanian untuk memilih sesuatu. Sedangkan menurut Rappaport dalam Suharto (2017:59) pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi, dan komunitas

diarahkan agar mampu menguasai (berkuasa atas) kehidupannya.

Keberhasilan pemberdayaan masyarakat tersebut dapat dilihat dari keberdayaan mereka menyangkut kemampuan ekonomi, kemampuan mengakses manfaat kesejahteraan, dan kemampuan kultural dan politis. Schuler Hashemi dan Riley dalam Suharto (2017:63) mengatakan bahwa keberhasilan pemberdayaan dapat dilihat melalui beberapa indikator keberdayaan yaitu kebebasan mobilitas, kemampuan membeli komoditas kecil, kemampuan membeli komoditas besar, terlibat dalam pembuatan keputusan-keputusan rumah tangga, kebebasan relatif dari dominasi keluarga, kesadaran hukum dan politik, keterlibatan dalam kampanye dan protes-protes, serta adanya jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga.

Berdasarkan delapan indikator keberhasilan pemberdayaan tersebut peneliti hanya menggunakan lima indikator untuk melihat keberhasilan pemberdayaan Kelompok Wanita Tani dari segi perekonomian mereka, indikator tersebut yaitu kebebasan mobilitas, kemampuan membeli komoditas kecil, kemampuan membeli komoditas besar, terlibat dalam keputusan-keputusan rumah tangga, serta adanya jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga.

Kelompok Wanita Tani

Secara teoritis kelompok tani diartikan sebagai kumpulan petani yang terikat secara informal atas dasar keserasian dan kepentingan bersama dalam usaha tani. Jumlah anggota kelompok idealnya berkisar 20-30 anggota yang disesuaikan dengan kondisi dan wilayah kerja kelompok tani tersebut. Anggota kelompok tani dapat berupa petani dewasa, dan pemuda, wanita, dan pria. Pada tingkat desa biasanya sistem usaha tani dijalankan oleh Kelompok Wanita Tani.

Kelompok Wanita Tani adalah kumpulan isteri petani yang membantu usaha pertanian, perikanan, dan kehutanan dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarganya. Menurut Departemen Pertanian dalam Masithoh (2013:3) Kelompok Wanita Tani merupakan kumpulan isteri petani atau wanita tani yang bersepakat membentuk suatu perkumpulan yang mempunyai tujuan

yang sama dalam membantu kegiatan usaha pertanian, perikanan, dan kehutanan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarganya. Kelompok Wanita Tani berbeda dengan kelompok tani yang lainnya karena Kelompok Wanita Tani diarahkan untuk dapat menambah penghasilan keluarga dengan cara mempunyai suatu usaha produktif dalam skala rumah tangga dengan memanfaatkan atau mengolah hasil-hasil pertanian yang ada di lingkungan tempat kelompok tersebut tinggal. Menurut Nurmayasari dan Ilyas (2014:31), wanita bukan hanya berperan sebagai ibu rumah tangga pada dunia pertanian, tetapi banyak wanita yang ikut berperan atau memberi kontribusi pendapatan dalam keluarga pada usaha yang diusahakan oleh keluarga mereka.

Berdasarkan pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa kelompok wanita tani (KWT) merupakan salah satu bentuk kelembagaan petani yang mana anggotanya terdiri dari wanita-wanita yang menjalankan kegiatan pertanian. Berbeda dengan kelompok tani yang lainnya, kelompok wanita tani dalam pembinaannya diarahkan untuk mempunyai suatu usaha produktif dalam skala rumah tangga yang memanfaatkan atau mengolah hasil-hasil pertanian maupun perikanan, sehingga dapat menambah penghasilan keluarga.

III. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Adapun fokus dalam penelitian ini yaitu mendeskripsikan keberhasilan pemberdayaan Kelompok Wanita Tani melalui program Kawasan Rumah Pangan Lestari dan mendeskripsikan faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan program Kawasan Rumah Pangan Lestari. Sedangkan jenis dan sumber data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dan observasi sedangkan data sekunder diperoleh dari sumber-sumber buku cetak, dokumentasi, dan beberapa sumber yang berasal dari internet. Analisis

data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis data tersebut digunakan untuk mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) merupakan program pemberdayaan masyarakat untuk mengembangkan aneka tanaman pangan, ternak, dan ikan secara terpadu dan berkelanjutan di pekarangan rumah melalui Kelompok Wanita Tani. Dalam hal ini program KRPL dilaksanakan oleh Kelompok Wanita Tani Mawar 1 dan Merpati Asri sejak tahun 2017. Selama pelaksanaan program KRPL Kelompok Wanita Tani menerima bantuan sebesar Rp 65.000.000 untuk kegiatan pengembangan pekarangan masing-masing anggota, dana bantuan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Kelompok Wanita Tani, serta untuk membeli bibit-bibit tanaman pangan dan ikan yang akan mereka budidayakan. Kemudian mereka juga mendapat sosialisasi dan penyuluhan-penyuluhan secara terus-menerus dari Dinas Pangan Kota Bandar Lampung guna meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka terhadap kegiatan budidaya.

Setiap anggota Kelompok Wanita Tani diwajibkan memproduksi 70 polybag tanaman pangan agar hasil yang diperoleh cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka dan dapat menambah penghasilan bagi keluarga. Berikut merupakan gambaran kegiatan KRPL yang dilakukan Kelompok Wanita Tani.



Gambar 4. Kegiatan KRPL
Sumber: Dokumentasi Kelompok Wanita Tani Merpati Asri (2020)

Gambar 4 merupakan produksi tanaman pangan dan ikan yang dilakukan oleh Kelompok Wanita Tani Mawar 1 dan Kelompok Wanita Tani Merpati Asri. Sejak tahun 2017 pelaksanaan program KRPL telah memberikan kontribusi pangan bagi keluarga mereka. Bukan hanya pangan yang tercukupi namun dengan adanya program KRPL anggota Kelompok Wanita Tani dapat menambah penghasilan dari penjualan tanaman pangan yang mereka pasarkan. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Ketua Kelompok Wanita Tani Merpati Asri bahwa dengan adanya program KRPL dapat meningkatkan perekonomian mereka dan pengeluaran untuk belanja pun menjadi berkurang karena mereka menghasilkan sayuran dari lahan pekarangannya sendiri. Selain itu program KRPL juga dapat menambah penghasilan dari produksi sayuran dan ternak yang dilakukan.

Berdasarkan fokus penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya, maka uraian hasil penelitian ini disesuaikan dengan fokus penelitian tersebut. Peneliti menggunakan teori indikator keberhasilan pemberdayaan perempuan dari segi peningkatan ekonomi menurut Schuler, Hashemi, dan Riley dalam Suharto (2004:64). Pemberdayaan dapat

dikatakan berhasil apabila telah memenuhi indikator-indikator keberhasilan tersebut. Berikut merupakan keberhasilan pemberdayaan Kelompok Wanita Tani dilihat dari lima indikator keberhasilan :

1. Kebebasan mobilitas

Mobilitas dalam hal ini merupakan suatu pergerakan yang dapat memberikan kemandirian dan kebebasan bagi setiap individu untuk melakukan sesuatu yang diinginkan. Kebebasan mobilitas dalam pelaksanaan program KRPL dapat dikatakan berhasil. Perubahan pekerjaan yang dilakukan oleh Kelompok Wanita Tani membuat mereka mengalami peningkatan mobilitas. Peningkatan mobilitas pada Kelompok Wanita Tani ini dapat dilihat dari segi pekerjaan mereka yang sebelumnya bermata pencaharian sebagai buruh atau tidak bekerja dan tidak memiliki kegiatan di rumah setelah adanya program KRPL anggota Kelompok Wanita Tani Mawar 1 dan Kelompok Wanita Tani Merpati Asri menjadi memiliki kegiatan harian dan memiliki penghasilan sebagai petani. Peningkatan pendapatan yang mereka peroleh bervariasi antara anggota Kelompok Wanita Tani, bervariasi dalam hal ini tergantung pada banyak atau tidaknya jumlah produksi tanaman yang mereka produksi. Pendapatan tersebut berkisar antara Rp 300.000,00 sampai Rp 900.000,00 per bulannya.

Menurut Suyanto (2004:192) sebuah mobilitas memungkinkan seseorang untuk menduduki status sesuai dengan keinginannya, selain itu mobilitas sosial dapat mendorong seseorang untuk lebih maju dan mempercepat tingkat perubahan sosial masyarakat ke arah yang lebih baik. Mobilitas dalam penelitian ini dapat mendorong Kelompok Wanita Tani untuk mendapatkan penghasilan secara mandiri. Faktor pendorong dari adanya mobilitas pada Kelompok Wanita Tani tersebut bukan hanya dipengaruhi oleh faktor kebutuhan saja melainkan juga karena adanya keinginan untuk merasakan kebebasan. Selain peningkatan mobilitas dalam hal pendapatan, kegiatan KRPL juga menjadikan Kelompok Wanita Tani Mawar 1 dan Kelompok Wanita Tani Merpati Asri mampu meningkatkan kemampuan dan pengetahuannya di bidang sosial. Kelompok Wanita Tani Mawar 1 dan

Merpati Asri saat ini dapat bersosialisasi dengan baik di lingkungan masyarakat. Dari yang sebelumnya cuek dan menutup diri saat ini setelah mengikuti program KRPL hubungan antar anggota dan masyarakatnya semakin lebih dekat, mereka sering melakukan perkumpulan rutin, sosialisasi dan bertukar informasi mengenai manfaat yang didapatkan dari program KRPL guna mengajak masyarakat yang belum bergabung untuk ikut melaksanakan program KRPL sebagai tambahan penghasilan.

2. Kemampuan membeli komoditas kecil

Kemampuan membeli komoditas kecil dalam hal ini kemampuan individu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Menurut Nurmayasari dan Ilyas (2014:31), wanita bukan hanya berperan sebagai ibu rumah tangga, tetapi harus ikut berperan atau memberi kontribusi pendapatan dalam keluarga pada usaha yang dilakukan oleh keluarga mereka. Berdasarkan teori tersebut wanita dituntut untuk memiliki kegiatan atau usaha lain untuk menghasilkan pendapatan sendiri agar dapat membantu ekonomi keluarga.

Adanya program KRPL menjadikan Kelompok Wanita Tani Merpati Asri dan Kelompok Wanita Tani Mawar 1 memiliki usaha produktif mandiri, dengan usaha tersebut rata-rata anggota Kelompok Wanita Tani sudah mampu memenuhi kebutuhan sehari-harinya dari kegiatan KRPL. Dengan kegiatan produksi tanaman pangan, tanaman hortikultura, serta produksi perikanan yang mereka lakukan dapat menambah penghasilan mereka dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya, seperti tambahan untuk membeli beras, membeli minyak, membeli bumbu-bumbu dapur, serta kebutuhan lain yang mereka perlukan tanpa menunggu penghasilan yang diberikan oleh suami. Adanya peluang kerja pada sektor pertanian memberikan kesempatan bagi Kelompok Wanita Tani untuk membangun kemandirian dan meningkatkan produktivitas mereka sebagai tambahan penghasilan.

3. Kemampuan membeli komoditas besar

Kemampuan membeli komoditas besar pada indikator keberhasilan pemberdayaan ekonomi menurut Suharto (2004:64)

diartikan sebagai kemampuan individu untuk membeli barang-barang sekunder atau tersier, seperti lemari pakaian, tv, radio, koran, pakaian keluarga, dan lain-lain dengan uangnya sendiri. Adanya program KRPL belum mampu mencukupi semua kebutuhan Kelompok Wanita Tani. Kelompok Wanita Tani Merpati Asri dan Kelompok Wanita Tani Mawar 1 belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan sekunder mereka. Hal ini tergantung dari banyak atau tidaknya jumlah produksi tanaman pangan dan ikan yang mereka hasilkan. Semakin banyak yang mereka produksi maka penghasilannya pun dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sekunder mereka.

Selama ini pelaksanaan kegiatan KRPL hanya mampu memenuhi kebutuhan pangan keluarga dan memenuhi kebutuhan sehari-hari Kelompok Wanita Tani. Hanya beberapa anggota saja yang terkadang mampu memenuhi kebutuhan sekunder mereka dari kegiatan KRPL, padahal dalam hal bantuan yang diperoleh masing-masing anggota Kelompok Wanita Tani sama. Hal tersebut karena dipengaruhi oleh keaktifan anggota Kelompok Wanita Tani sehingga mempengaruhi jumlah produksi yang mereka hasilkan.

4. Terlibat dalam keputusan rumah tangga

Pengambilan keputusan dapat dikaitkan dengan kontrol dan kekuasaan yang dimiliki seseorang. Pada umumnya peran laki-laki atau suami lebih dominan pada pengambilan keputusan dalam rumah tangga dan peran perempuan dianggap terbatas dalam pemenuhan kebutuhan akan keluarganya. Namun perbedaan tersebut tidak akan menjadi masalah selama tidak dilakukan "pembedaan" diantara perempuan dan laki-laki tersebut. Keadilan dan kesetaraan diharapkan dapat menempatkan laki-laki dan perempuan dengan hak, kedudukan, dan kesempatan kerja yang setara.

Pengambilan keputusan dalam pelaksanaan program KRPL didominasi oleh perempuan. Dalam hal ini perempuan memutuskan untuk bekerja sebagai wanita tani untuk menambah penghasilan keluarga. Menurut Kelompok Wanita Tani Mawar 1 dan Merpati Asri keputusan untuk bekerja dan memiliki kegiatan lain di luar rumah tersebut

dinilai memiliki keuntungan tersendiri bagi anggota Kelompok Wanita Tani.

Para anggota Kelompok Wanita Tani bekerja ini ingin merubah pemikiran masyarakat yang sudah terlanjur tertanam selama ini bahwa perempuan secara ekonomi tidak memberikan kontribusi bagi keluarga, perempuan hanya dilekatkan dengan sumur, dapur, dan kasur. Namun seiring berjalannya waktu penilaian tersebut sudah mulai bergeser. Adanya program KRPL pada sektor pertanian memberikan kesempatan kerja dan peluang usaha bagi perempuan terutama bagi Kelompok Wanita Tani penerima program KRPL. Penghasilan yang didapat dalam bekerja tersebut selain dapat menambah penghasilan juga dapat digunakan untuk keperluan lainnya seperti keperluan untuk biaya pendidikan anak dan biaya kesehatan keluarga.

Pada zaman modern saat ini biaya pendidikan yang harus dikeluarkan lumayan besar dan terkadang memberatkan anggota Kelompok Wanita Tani mengeluarkan uang untuk biaya pendidikan, mengingat pekerjaan suami yang mayoritas hanya bekerja sebagai wiraswasta, petani, dan buruh harian yang tidak memiliki penghasilan tetap menjadi kekhawatiran tersendiri bagi Kelompok Wanita Tani. Namun setelah mereka mengikuti program KRPL dan memiliki tambahan penghasilan dari usaha produktifnya biaya pendidikan anak menjadi terbantu. Kesadaran akan pentingnya pendidikan sudah dirasakan oleh masyarakat di Desa Way Dadi Baru dan Desa Pengajaran, yaitu dengan menyekolahkan anak mereka ke jenjang yang lebih tinggi diharapkan mampu memperbaiki perekonomian keluarga di masa yang akan datang.

5. Adanya jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga

Kegiatan pemberdayaan dilakukan agar dapat menimbulkan dampak perubahan bagi kelompok yang diberdayakan, sehingga mereka merasa mampu, berdaya, dapat memenuhi kebutuhan pokok dalam hidupnya. Pelaksanaan program KRPL banyak memberikan manfaat bagi anggota Kelompok Wanita Tani Merpati Asri dan Mawar 1, manfaat yang paling dirasakan oleh Kelompok Wanita Tani mereka mampu memenuhi kebutuhan pokoknya dengan

bersumber dari kegiatan KRPL yang mereka lakukan. Selain dapat memenuhi kebutuhan pokok mereka, dengan adanya program KRPL Kelompok Wanita Tani menjadi terbantu dalam hal ekonomi yaitu Kelompok Wanita Tani saat ini mampu memiliki tabungan dari hasil budidaya tanaman dan ternak yang mereka produksi. Adanya program KRPL ini mampu menekan biaya pengeluaran rumah tangga mereka, sebelumnya mereka harus mengeluarkan biaya makan sekitar Rp 50.000, per hari, namun setelah mereka memproduksi sendiri berbagai jenis komoditas pangan pengeluaran rumah tangga mereka menjadi lebih berkurang sehingga uang tersebut dapat mereka tabung untuk kebutuhan lainnya.

Kegiatan KRPL juga menjadikan Kelompok Wanita Tani menjadi lebih mandiri karena setelah adanya pelatihan-pelatihan yang mereka dapatkan mereka sudah mampu melaksanakan kegiatannya secara mandiri. Hal ini sesuai dengan teori menurut Khairuddin (1992) dalam Zuliyah (2010:154) yaitu pemberdayaan masyarakat desa bukan hanya sekedar membantu mereka dalam mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi terutama dalam rangka peningkatan taraf hidupnya, tetapi juga merupakan usaha untuk membentuk kemandirian dalam diri mereka yang pada tahap selanjutnya segala permasalahan yang ada disekitar mereka dapat diselesaikan dan diatasi sendiri.

Faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan program KRPL

A. Faktor pendukung

1) Rendahnya dukungan dari pemerintah desa dan masyarakat sekitar. Hal ini karena tidak adanya pendampingan dari pemerintah desa dalam pelaksanaan kegiatan KRPL. Pemerintah Desa tidak ikut berperan dalam pelaksanaan program KRPL, tidak ada bantuan-bantuan dan bentuk pengawasan dari pemerintah desa setempat. Selama ini Kelompok Wanita Tani Mawar 1 dan Kelompok Wanita Tani Merpati Asri hanya mendapat dukungan dari Dinas Pangan Kota Bandar Lampung. Padahal menurut Kelompok Wanita Tani tersebut pemerintah desa memiliki andil yang besar untuk mendorong dan mengajak masyarakat lainnya agar terlibat sepenuhnya dalam pelaksanaan program KRPL.

2) Kurangnya Partisipasi anggota Kelompok Wanita Tani. Partisipasi anggota Kelompok Wanita Tani masih rendah, hal ini terlihat dari partisipasi anggota yang masih berubah-ubah, partisipasi anggota kelompok hanya aktif pada awal pelaksanaan program setelah itu keaktifan dari beberapa anggota Kelompok Wanita Tani menjadi berkurang.

3) Musim kemarau, terjadinya musim kemarau membuat Kelompok Wanita Tani mengalami kesulitan untuk mendapatkan air, karena kebanyakan anggota Kelompok Wanita Tani mengandalkan air sumur untuk membantu mereka dalam melakukan budidaya tanaman pangan yang mereka produksi sehingga pada saat musim kemarau mereka mengeluhkan sulit untuk mendapatkan sumber air yang mengakibatkan tanaman menjadi kering dan mati.

B. Faktor Penghambat

1) Anggaran yang memadai. Anggaran merupakan faktor pendukung utama dalam pelaksanaan program KRPL, dengan anggaran yang cukup maka pelaksanaan program dapat berjalan dengan baik. Anggaran untuk program KRPL ini sangat memadai, Kelompok Wanita Tani yang menerima program KRPL mendapat anggaran dari pemerintah sebesar Rp 65.000.000 juta pada tahun pertama. Anggaran tersebut digunakan oleh Kelompok Wanita Tani untuk membeli sarana dan prasarana yang dibutuhkan, untuk membangun kebun bibit kelompok, untuk membeli benih-benih ikan serta untuk membeli bibit-bibit tanaman untuk pengembangan pekarangan anggota Kelomppok Wanita Tani, sehingga program KRPL dapat terlaksana dengan baik.

2). Adanya sumber daya yang berkualitas dan memadai. Dalam hal ini Penyuluh Pendamping Lapangan dari Dinas Ketahanan Pangan Kota Bandar Lampung memiliki tingkat pengetahuan dan keterampilan yang berkualitas.

V. PENUTUP

Simpulan

Kebijakan pemerintah melalui program KRPL telah memberikan banyak manfaat bagi

Kelompok Wanita Tani. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator keberhasilan pemberdayaan Kelompok Wanita Tani melalui program KRPL yang telah tercapai yaitu kebebasan mobilitas, kebebasan mobilitas dalam hal ini yaitu adanya perubahan pekerjaan pada Kelompok Wanita Tani yang sebelumnya tidak bekerja dan tidak memiliki kegiatan harian saat ini Kelompok Wanita Tani Mawar 1 dan Kelompok Wanita Tani Merpati Asri memiliki kegiatan dan dapat bekerja sebagai petani untuk menambah penghasilan ekonomi keluarga mereka secara mandiri tanpa meninggalkan kewajibannya sebagai istri dan ibu rumah tangga.

Selain itu kemampuan membeli komoditas kecil untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka juga dapat dipenuhi melalui pelaksanaan program KRPL ini, namun untuk membeli komoditas besar atau kebutuhan sekunder belum sepenuhnya dapat dipenuhi oleh semua anggota Kelompok Wanita Tani, selain itu adanya program KRPL ini dapat menekan biaya pengeluaran rumah tangga Kelompok Wanita Tani sehingga biaya belanja rumah tangga menjadi berkurang.

Namun dalam pelaksanaan pemberdayaan Kelompok Wanita Tani melalui program KRPL tidak terlepas dari faktor pendukung dan faktor penghambat. Dalam hal ini yang menjadi faktor penghambat yaitu dukungan pemerintah desa dan masyarakat sekitar masih rendah, terjadinya musim kemarau, serta berkurangnya partisipasi anggota Kelompok Wanita Tani. Sedangkan faktor pendukung dalam pelaksanaan pemberdayaan Kelompok Wanita Tani melalui program KRPL diantaranya yaitu anggaran yang cukup dan sumber daya yang berkualitas dan memadai.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang dapat penulis berikan adalah perlu adanya dukungan pemerintah desa setempat dalam melaksanakan program KRPL. Dalam hal ini pihak dari kelurahan hendaknya mendampingi dan membantu melakukan evaluasi serta melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program KRPL, perlu adanya mitra yang membantu memasarkan

produksi tanaman pangan, sehingga Kelompok Wanita Tani dapat meningkatkan penjualannya dari hasil tanaman pangan yang mereka produksi, serta perlu adanya peningkatan dalam memberikan pelatihan, sosialisasi, dan kunjungan oleh Penyuluh Pertanian Lapangan agar keaktifan anggota Kelompok Wanita Tani tidak menurun.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmadi, Rulam. (2016). Metodologi Penelitian Mardikanto dan Soebiato. (2019). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Moleong, L. J. (2016). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Suharto, E. (2017). Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategic Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial. Bandung: PT. Refika Aditama
- Soetomo. (2018). Pemberdayaan Masyarakat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tresiana, N. (2017). Kebijakan Publik. Bandar Lampung: Aura.
- Tresiana, N. (2014). Metode Penelitian Kualitatif. Bandar Lampung: Lembaga Penelitian Universitas Lampung.

Jurnal dan Skripsi

- Evendi, A.A., Suryadharma, P. (2020). Peran Kelompok Wanita Tani dalam Perekonomian Masyarakat Desa Neglasari Kabupaten Bogor. Jurnal Pusat Inovasi Masyarakat, Vol.2 (2). 252-256.
- Faedlulloh, D., Irawan, B., & Prasetyanti, R. (2019). Program unggulan kampung iklim (proklim) berbasis pemberdayaan masyarakat. Publisia (Jurnal Ilmu Administrasi Publik), 4(1), 28.
- Ferianti, I. (2018). Pemberdayaan Masyarakat Petani Dalam Meningkatkan Hasil Panen Padi Melalui Program Kelompok Tani (Studi Pada Kelompok Tani Sumpersari Dusun Sumpersari Pekon Kresnomulyo Kabupaten Pringsewu.
- Hadi, A. P. (2010). Konsep Pemberdayaan, Partisipasi, dan Kelembagaan Dalam

- Pembangunan. Yayasan Agribisnis/Pusat Pengembangan Masyarakat Agrikarya.
- Masithoh, S. Partisipasi Anggota Kelompok Wanita Tani Dalam Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) Di Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor.
- Prabowo, D.W., (2014). Pengelompokan Komoditi Bahan Pangan Pokok Dengan Metode Analytical Hierarchy Process.
- Prihtanti, T. M., Kristianingsih, S. A. (2010). Dampak Multi Peran dan Pekerjaan Wanita Tani. *Jurnal AGRIC*, 22(1).91-104.
- Rachman, H.P., Ariani, M. (2002). Ketahanan Pangan: Konsep, Pengukuran, dan Strategi. *FAE*, Vol.20, No. 1.12-24.
- Ruslan, M. (2010). Pemberdayaan Perempuan Dalam Dimensi Pembangunan Berbasis Gender. *Musnawa*, Vol.2, No. 1.
- Saliem, H. P. (2011). Kawasan Rumah Pangan Lestari Sebagai Solusi Pemantapan Ketahanan Pangan, Makalah disampaikan pada Kongres Ilmu Pengetahuan Nasional. Jakarta, 8-10 November.
- Sugi, M., dan Sumarno. Pemberdayaan Perempuan Melalui Pelatihan Pengolahan Bahan Pangan Lokal. *Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 2, No. 2.
- Marwanti, S., dan Astuti, I. D. (2012). Model Pemberdayaan Perempuan Miskin Melalui Pengembangan Kewirausahaan Keluarga Menuju Ekonomi Kreatif di Kabupaten Karanganyar. *SEPA*, Vol. 9, No. 1.